

**TESIS**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA**  
**TANAH YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI NOTARIS**

*Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar*  
*Magister Kenotariatan*



Oleh :

**SAFITRA TOBIKESUMA EFENDI**

**NIM. 1520123017**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H**  
**Dr. Beatrix Benni, S.H., M.Pd., M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2017**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI NOTARIS**

(Safitra Tobikesuma Efendi, 1520123017, Program Magister Kenotariatan, Universitas Andalas, 121 halaman)

## **ABSTRAK**

Notaris pada umumnya menjabat sebagai PPAT, kedua jabatan tersebut berbeda sifat dan lingkup kegiatannya. Seringkali secara keliru ada yang menyamakan kedua jabatan tersebut, karena notaris dan PPAT sama-sama berwenang membuat akta. Tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya tugas yang dilaksanakan oleh PPAT tidak terdapat perlindungan hukum bagi PPAT saat sedang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum seperti jabatan notaris yang mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum. Aspek perlindungan hukum bagi PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya menjadi sesuatu yang sangat penting, karena PPAT dalam menjalankan tugas dan jabatannya rentan terjerat hukum, lalu apakah perlindungan hukum bagi Notaris dapat mencakup perlindungan hukum bagi PPAT yang pada dasarnya PPAT sudah pasti seorang Notaris. Dari hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pengaturan serta bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai rangkap jabatan dari Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dimana penelitian ini menekankan kepada norma-norma hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan suatu keadaan yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan kemudian dianalisis lebih dalam menggunakan teori-teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara normatif atau eksplisit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta peraturan Perundang-undangan terkait ke-PPAT-an lainnya belum mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum terhadap PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya berkaitan dengan prosedur khusus penegakan hukum terhadap PPAT. Kedua, Jabatan PPAT tetap terpisah dengan Jabatan Notaris, sehingga seseorang yang diangkat menjadi Notaris tidak akan otomatis merangkap jabatan PPAT atau tidak otomatis melekat jabatan PPAT.

***Kata Kunci : Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah.***

## **LEGAL PROTECTION FOR LAND DEED OFFICIAL WHO DOUBLED HIMSELF AS NOTARIST**

(Safitra Tobikesuma Efendi, 1520123017, Magister of Notary Department, Law Faculty, Andalas University, 121 pages)

### **ABSTRACT**

It is common for a notary to double himself/herself as land deed official even though the two functionaries are different in terms of characteristics and field of activity. The two functionaries are often overlapped to each other since either notary or land deed official has authority to make a deed. Their authority and jobs are based on the applicable legislation. Unlike a notary, land deed official doesn't get any legal protection when perform important tasks and authority as a public officials. The aspect of legal protection for land deed official is extremely important since land deed official is vulnerable under the law. Thus, by the fact that a land deed official is surely a notary in nature, is legal protection for a notary also applicable for a land deed maker? Based on this, the things that would be studied were the regulations and the form of legal protection for land deed official who functionary-doubled as a notary in performing the tasks. The method of the research used was normative law, whereas this research emphasized to the norms of the law directed to study one or more phenomena of the law. This research was analytical descriptive which draws and explains a situation obtained from field study, and then it was analyzed deeper by using relevant theories. According to the result of the research, it can be concluded that explicitly, the government regulation no 24, year 2016, the amendment of the government regulation no 37, year 1998 about the regulation of land deed official functionary and the regulation of law related to land deed official matters, has not regulated yet assertively about the legal protection for land deed officials in performing their functionary tasks related to special procedure of the rule of law for land deed official. Secondly, the functionary of land deed officials and notary is dissimilar, so that the one who is appointed as a notary will not automatically be a land deed official, or attached to a land deed official status.

***Key words: notary, land deed officials***